

## **BAB V.**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan Penelitian**

1. Praktek pertanian cengkeh di Kecamatan Lede masih dilakukan secara konvensional dalam bentuk perkebunan rakyat dengan sifat monokultur, serta bertumbuh dengan karakter pertanian yang mandiri oleh petani. Pertanian cengkeh berorientasi komersial (pasar) dan merupakan sektor ekonomi dominan dengan areal pengembangan cukup luas melibatkan sejumlah besar KK petani, sebagai sektor lokal utama penyedia lapangan kerja, dengan produktifitas tahunan cengkeh yang tinggi, serta kontribusi ekonomi cengkeh yang dominan pada pendapatan setiap rumah tangga petani cengkeh. Komoditi cengkeh yang dikembangkan petani di Kecamatan Lede memiliki prospek untuk dikembangkan sebagai sektor basis dalam pengembangan ekonomi lokal.
2. Peran pemerintah daerah dalam sistem pertanian cengkeh di Kecamatan Lede belum optimal dengan intervensi kebijakan yang terbatas hanya pada beberapa alokasi program pendukung dalam tahap produksi cengkeh. Demikian halnya pada aspek peranan sektor swasta yang belum secara luas berkontribusi dalam sistem pertanian cengkeh sehingga belum memberikan dampak yang diharapkan dalam memaksimalkan potensi ekonomi cengkeh lokal.
3. Dalam sistem pertanian cengkeh di Kecamatan Lede ditemukan sejumlah hambatan, diantaranya:
  - a. *Hambatan pada skala agribisnis cengkeh petani*; status penguasaan lahan petani, keterbatasan modal pada masa panen, tidak eksisnya kelembagaan petani, minimnya penyuluhan dan pendampingan, keterbatasan alokasi pekerja pemetik cengkeh dan ketergantungan yang tinggi pada pekerja migran, minim ketersediaan infrastruktur pendukung, kendala iklim dan cuaca pada masa panen, fluktuasi harga cengkeh, serta kelembagaan pemasaran yang belum menguntungkan petani.

- b. *Hambatan pada intensitas peran pemerintah daerah*; alokasi belanja sektor pertanian pada APBD yang masih sangat minim, belum terbangunnya korelasi dan relevansi program antar SKPD dalam mendukung kegiatan sektor pertanian, tidak ada korelasi belanja dan pembiayaan antar tingkatan baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan desa, program dan SDM dari OPD terkait yang belum optimal, serta visi umum pemerintah daerah yang pada prinsipnya belum menyoar optimalisasi ekonomi pada sub-sektor perkebunan cengkeh.
- c. *Hambatan pada peran sektor swasta*; keterbatasan sumberdaya pada sektor swasta dalam upaya perluasan perannya dalam mendukung sistem agribisnis cengkeh lokal, belum adanya intervensi pemerintah daerah untuk memberi penguatan pada keberdayaan dan kapasitas peran sektor swasta melalui bangunan kemitraan yang ideal.

## **B. Saran Penelitian**

1. Perlu penelitian lebih lanjut untuk mengetahui besaran implikasi ekonomi yang dihasilkan dari pertanian cengkeh baik pada *backward linkage* (dampak kebelakang) maupun *forward linkage* (dampak kedepan).
2. Peran pemerintah daerah harus diintensifkan pada; 1) penyediaan infrastruktur jalan-jalan produksi, 2) penyuluhan dan pendampingan, 3) kebijakan dalam mengatasi kelangkaan pekerja, 4) kebijakan untuk mengatasi hambatan iklim dan cuaca, 5) akses permodalan, 6) kemitraan dengan swasta dalam mendorong ketersediaan pasar serta stabilisasi dan optimalisasi harga pada skala lokal, 7) memaksimalkan kelembagaan petani, 8) penyelesaian persoalan status penguasaan lahan petani, 9) penetapan regulasi pendukung kegiatan pertanian, 10) membangun kolaborasi dan intervensi pada peningkatan peran sektor swasta, 11) kemitraan dengan pihak swasta dalam mewujudkan keterkaitan antar setiap faktor dan sektor ekonomi dengan agribisnis cengkeh, 12) serta inovasi bersama pihak swasta dalam mendorong peningkatan nilai tambah ekonomi dari komoditi cengkeh. Sebaliknya intervensi peran pemerintah daerah pada gilirannya harus dapat diposisikan pada konteks yang tepat dan tetap menjaga kesinambungannya dalam terus memberi penguatan pada karakter

kemandirian petani cengkeh lokal.

3. Mendorong peranan sektor swasta melalui kemitraan strategis dengan menitikberatkannya pada beberapa faktor yakni; 1) investasi swasta untuk menyediakan pasar pada tingkat lokal baik sebagai pasar komoditi pertanian maupun pasar pada sejumlah kebutuhan petani baik pada faktor *input* maupun *output* dalam agribisnis cengkeh, 2) pemenuhan akses permodalan melalui kelembagaan keuangan yang lebih efisien, 3) kemitraan antar pihak dalam menyelesaikan kendala iklim/cuaca pada masa panen cengkeh, 4) mendorong terwujudnya keterkaitan antar sektor ekonomi melalui kemitraan dengan pemerintah daerah dalam aspek regulasi dan investasi, 5) mendorong perluasan kegiatan hilir dari pertanian cengkeh untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi baik pada komoditi cengkeh hasil tani maupun pada potensi ekonomi lain dari pertanian cengkeh yang dikembangkan seperti pada pemanfaatan nilai ekonomi dari daun dan gagang cengkeh.

